

Evaluasi Proses Verifikasi Surat Pertanggungjawaban Belanja dalam Pengelolaan Anggaran di Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta

Alfatita Lathofah Nisa ^{1*}, Hasanah Setyowati ²

^{1, 2} STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia

* alfatitanisa17@gmail.com

Abstract

Urgensi penelitian ini untuk memastikan akuntabilitas, ketepatan administrasi, serta mencegah kesalahan dan potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran di dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan kesesuaian proses verifikasi surat pertanggungjawaban belanja dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan transparansi dan kualitas pengelolaan anggaran di dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta. Verifikasi keuangan merupakan bagian dari penatausahaan keuangan daerah yang berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal untuk memastikan kebenaran, kelengkapan, dan kepatuhan dokumen sebelum dilakukan pencairan dan pelaporan anggaran. Proses verifikasi keuangan berperan penting dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian yaitu mencakup informasi dari bendahara, PPK, dan staf. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, dengan uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses verifikasi keuangan di dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta dilaksanakan secara berjenjang, melibatkan pihak-pihak terkait sesuai kewenangannya, serta berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Mekanisme verifikasi dilakukan melalui kombinasi pemeriksaan manual dan pemanfaatan sistem digital, seperti SIPD RI dan *Cash Management System* (CMS). Kendala yang ditemukan bersifat operasional dan tidak menunjukkan penyimpangan dari ketentuan. Secara keseluruhan, verifikasi keuangan berperan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran serta kualitas penyusunan SPJ dan laporan keuangan.

Keywords: *Verifikasi Keuangan, Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran, SOP, SPJ, Keuangan Daerah*

Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Astuti et al., 2024; Malissa et al., 2025; Peilouw et al., 2023). Keuangan daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administrasi fiskal, tetapi juga mencerminkan kapasitas pemerintah dalam menyediakan layanan publik, membiayai pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Suciandini et al., 2025; Almausshofi et al., 2025). Pada prinsip desentralisasi, keuangan daerah menjadi indikator penting keberhasilan otonomi, karena melalui pengelolaan yang baik daerah dapat menunjukkan kemandirian dan akuntabilitas dalam mengatur daerah otonom (Pengemanan, 2024). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber daya keuangan. Kewenangan ini dimaksudkan agar pelayanan publik lebih dekat dengan

masyarakat dan kebijakan daerah lebih sesuai dengan kebutuhan lokal (Mandasari et al., 2024; Mbipi et al., 2021). Namun, perlu diingat bahwa kewenangan besar selalu disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Daerah tidak hanya dituntut untuk mengelola anggaran secara efisien dan efektif, tetapi juga harus menjamin akuntabilitas dan transparansi agar dana publik benar-benar digunakan sesuai peruntukan (Nugroho et al., 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan negara harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memperjelas mekanisme pertanggungjawaban bendahara dan pejabat pengelola keuangan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki otonomi luas dalam mengelola keuangan, dengan kewajiban untuk tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Lebih teknis lagi, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 merinci siklus keuangan daerah yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pada tahap penatausahaan, verifikasi keuangan menjadi tahapan penting untuk menjamin keabsahan transaksi dan kelengkapan dokumen (Wahiruddin et al., 2025).

Proses verifikasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen penting, seperti Surat Perintah Membayar (SPM) sebelum pencairan dana, serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) setelah realisasi anggaran (Widyastuti et al., 2023). Verifikasi SPM memastikan bahwa pencairan dana dilakukan sesuai pagu anggaran dan aturan, sedangkan verifikasi SPJ memastikan bahwa realisasi kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana dan didukung bukti-bukti sah. Verifikasi memiliki dua fungsi yaitu sebagai mekanisme kontrol internal sekaligus sebagai instrumen pencegahan penyimpangan (Ponto et al., 2024). Pada proses verifikasi, setiap transaksi diperiksa secara administratif sehingga kesalahan pencatatan dapat diminimalisasi. Verifikasi juga mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan anggaran karena setiap transaksi harus disertai bukti yang lengkap (Fitaloka et al., 2025; Pangemanan et al., 2024).

Verifikasi keuangan tidak selalu berjalan efektif (Warna et al., 2024). Beberapa tantangan umum yang sering dihadapi pemerintah daerah antara lain keterlambatan penyampaian dokumen, dokumen administrasi belum lengkap, keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi (Saputro et al., 2025). Kondisi ini sering menyebabkan laporan keuangan terlambat, kualitas pertanggungjawaban menurun, dan akuntabilitas publik terganggu (Dewanta et al., 2021; Wiguna et al., 2024).

Sebagai kota pendidikan, budaya, dan pariwisata, Kota Yogyakarta memerlukan tata kelola keuangan yang lebih tertib dan akuntabel. Kebutuhan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan layanan publik menuntut pengelolaan keuangan yang tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga transparan dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat. Salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran strategis adalah dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2021, dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perindustrian, koperasi, dan usaha kecil menengah. Dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta wajib memastikan bahwa seluruh proses administrasi keuangan, terutama verifikasi, dijalankan dengan benar. Kegiatan verifikasi penting karena dana yang dikelola digunakan untuk mendukung program-program pemberdayaan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Kegagalan dalam melaksanakan verifikasi dengan baik akan

berdampak pada menurunnya kualitas laporan keuangan dan berpotensi menimbulkan kerugian negara (Syahban et al., 2025).

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa proses verifikasi Surat Pertanggungjawaban Belanja di dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta masih belum terlaksana secara maksimal dan memerlukan perbaikan yang berkelanjutan. Berbagai kendala yang sering ditemui meliputi keterlambatan dalam penyusunan SPJ oleh pelaksana kegiatan, ketidaklengkapan maupun ketidaksesuaian dokumen pendukung dengan ketentuan yang berlaku, serta terbatasnya jumlah dan kompetensi sumber daya manusia pada bagian keuangan yang menangani proses verifikasi. Selain itu, beban kerja yang cukup tinggi dan keterbatasan waktu turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan verifikasi. Kondisi tersebut berdampak langsung pada terhambatnya proses pelaporan keuangan, menurunnya ketepatan waktu penyampaian laporan, serta berpotensi mengurangi tingkat akurasi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan anggaran, sehingga memerlukan evaluasi menyeluruh guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Kesenjangan antara regulasi yang jelas dengan implementasi di lapangan menunjukkan adanya masalah serius. Regulasi telah menuntut akuntabilitas dan transparansi, tetapi tanpa verifikasi yang kuat, prinsip tersebut tidak akan terwujud. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana proses verifikasi dijalankan, apa saja kendalanya, dan bagaimana perannya dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Penelitian mengenai proses verifikasi keuangan di dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta menjadi relevan dalam konteks ini. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang tahapan verifikasi, kesesuaiannya dengan regulasi, serta kontribusinya terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, baik dari sisi prosedural, administratif, maupun sumber daya manusia. Dengan pemahaman tersebut, rekomendasi perbaikan dapat diberikan agar proses verifikasi lebih efektif dan mendukung tata kelola keuangan yang lebih baik.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus evaluasi yang secara spesifik menelaah proses verifikasi SPJ pada tingkat perangkat daerah, khususnya di dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta, dengan mengintegrasikan aspek ketepatan waktu, kelengkapan dokumen, kapasitas sumber daya manusia, serta kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian prosedur secara administratif, tetapi juga mengkaji hambatan operasional dan praktik aktual di lapangan sebagai dasar perumusan rekomendasi perbaikan yang kontekstual dan aplikatif bagi peningkatan kualitas tata kelola anggaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara komprehensif proses verifikasi Surat Pertanggungjawaban Belanja dalam pengelolaan anggaran di dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta, guna mengidentifikasi permasalahan, tingkat efektivitas pelaksanaan, serta kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dirumuskan upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan ketepatan pelaporan keuangan daerah.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menekankan pada makna, proses, serta konteks (Sugiyono, 2022). Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian ini berusaha

menggambarkan secara rinci dan sistematis mengenai bagaimana proses verifikasi keuangan dilaksanakan pada dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai prosedur, hambatan, dan peran verifikasi keuangan dalam meningkatkan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan anggaran.

Penelitian dilaksanakan di dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta, yang beralamat di Jl. Kenari No. 56, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Penelitian dilaksanakan mulai bulan Agustus 2025 sampai Oktober 2025. Periode ini dipilih agar peneliti dapat mengamati secara langsung proses pengelolaan keuangan dalam satu siklus verifikasi, mulai dari pengajuan dokumen, pemeriksaan, hingga pertanggungjawaban.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1). Data primer: Diperoleh langsung dari sumber utama melalui wawancara, observasi, dan interaksi dengan pihak-pihak terkait. Subjek penelitian ini mencakup informasi dari bendahara, PPK, dan staf keuangan mengenai pengalaman, prosedur, hambatan, serta persepsi mereka terhadap efektivitas verifikasi keuangan; 2). Data Sekunder: Diperoleh dari dokumen, arsip, laporan keuangan, Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Surat Perintah Membayar (SPM), serta peraturan yang berlaku. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat hasil analisis dan memberikan landasan hukum terhadap temuan penelitian.

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan: 1). Observasi: Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan verifikasi keuangan di dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta. Observasi dilakukan untuk melihat tahapan pemeriksaan dokumen, alur kerja staf keuangan, serta interaksi antarpegawai dalam proses verifikasi; 2). Wawancara: Wawancara mendalam dilakukan dengan bendahara pengeluaran, PPK, verifikator keuangan, dan petugas urusan. Pertanyaan wawancara disusun secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi detail sekaligus tetap fleksibel menyesuaikan dengan konteks pembicaraan; 3). Dokumentasi: Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan dokumen resmi seperti SPM, SPJ, laporan keuangan, serta peraturan yang berlaku. Dokumentasi juga mencakup notulen rapat atau catatan internal yang terkait dengan proses verifikasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif. Model ini dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian kualitatif, di mana proses pengumpulan data dan analisis berlangsung secara simultan. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama yang berlangsung secara siklus, yaitu: Reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Adapun Untuk menjamin validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif, digunakan empat kriteria *trustworthiness* menurut Lincoln & Guba, yaitu *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menerapkan kriteria *trustworthiness* menurut Lincoln dan Guba yang meliputi *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. *Credibility* dicapai melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi serta melakukan pengecekan ulang informasi kepada informan kunci seperti bendahara, PPK, dan staf keuangan. *Transferability* dipenuhi dengan menyajikan deskripsi konteks penelitian, lokasi, waktu, serta proses verifikasi keuangan secara rinci sehingga hasil penelitian dapat dipahami dan berpotensi diterapkan pada konteks serupa. *Dependability* dijaga dengan mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis, mulai dari pengumpulan hingga analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, sehingga alur

penelitian dapat ditelusuri. Sementara itu, *confirmability* dilakukan dengan memastikan bahwa temuan penelitian didasarkan pada data empiris yang diperoleh dari lapangan dan didukung oleh bukti dokumen resmi, sehingga hasil penelitian bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil

Analisis Proses Verifikasi Keuangan

Tabel 1. Triangulasi Data tentang Proses Verifikasi Keuangan

Pertanyaan wawancara: Dapatkah Bapak/Ibu menjelaskan secara umum bagaimana alur proses verifikasi keuangan di Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Yogyakarta?				
No	Narasumber		Tanggal Wawancara	Hasil Wawancara
	Nama	Jabatan		
1	Yasicha Ella Ellysa, A.Md.Ak.	Bendahara Pengeluaran	9 Oktober 2025	Proses verifikasi keuangan diawali dengan penyusunan dokumen SPJ oleh petugas urusan. SPJ tersebut harus ditandatangani oleh PPTK masing-masing sebelum diajukan ke subbag keuangan untuk dilakukan verifikasi.
2	Yogahayu Kusumajati, S.E.	Petugas Urusan Bidang Usaha Mikro Kecil	9 Oktober 2025	Alur verifikasi dimulai dari pengumpulan berkas administrasi oleh petugas urusan, kemudian diinput ke sistem. Setelah itu dokumen dimintakan paraf ketua tim kerja dan tanda tangan kepala bidang, dilanjutkan proses verifikasi di bagian keuangan, kemudian dimintakan persetujuan kepala dinas.
3	Agus Tejo Kumoro	Petugas Urusan Sekretariat	9 Oktober 2025	Proses verifikasi dimulai dari pembuatan Nota Pencairan Dana (NPD) beserta lampirannya, dilanjutkan dengan paraf petugas urusan dan kasubbag, serta tanda tangan PPTK sebelum dokumen masuk ke tahap verifikasi keuangan.
4	Ngesti Budi Purwanti, S.E.	Petugas Urusan Bidang Koperasi	14 Oktober 2025	SPJ diserahkan ke bagian keuangan untuk dilakukan koreksi oleh verifikator. Setelah itu dimintakan tanda tangan, dilakukan pembayaran pajak untuk transaksi tunai, penggandaan dokumen untuk arsip, pemindaian bukti transaksi, dan selanjutnya dana dapat dicairkan.
5	Siska Novi Anjarwati, A.Md.Ak.	Verifikator Keuangan	15 Oktober 2025	Petugas urusan menyeteror berkas SPJ untuk diverifikasi. Jika terdapat kekurangan dokumen, SPJ dikembalikan untuk diperbaiki. Apabila telah lengkap, dibuatkan billing, kemudian dimintakan tanda tangan Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran, lalu dilakukan pencairan melalui SIPD RI dan CMS.
6	Agustin Budi Darwanti, S.E.	Petugas Urusan Bidang Industri	15 Oktober 2025	SPJ dibuat oleh petugas urusan dan diparaf oleh tim kerja, kemudian langsung dimintakan tanda tangan PPTK atau kepala bidang sebelum diserahkan ke bagian keuangan untuk diverifikasi.
7	Raden Rara Asri Widya Mulyaningrum, S. Sos., M.Sc.	Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	15 Oktober 2025	Secara umum, pelaksana kegiatan melalui petugas urusan mengajukan berkas SPJ ke subbag keuangan untuk diverifikasi oleh verifikator, diketahui oleh bendahara dan PPK, serta disetujui oleh Pengguna Anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara pada tabel 1 dapat diketahui bahwa proses verifikasi keuangan di dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta dilaksanakan secara berjenjang dengan melibatkan beberapa pihak sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Analisis Pihak yang Terlibat dalam Proses Verifikasi

Tabel 2. Triangulasi Data tentang Pihak yang Terlibat dalam Proses Verifikasi Keuangan

Pertanyaan wawancara: Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses verifikasi?				
No	Narasumber		Tanggal Wawancara	Hasil Wawancara
	Nama	Jabatan		
1	Yasicha Ella Ellysa, A.Md.Ak.	Bendahara Pengeluaran	9 Oktober 2025	Verifikator keuangan merupakan pihak utama atau garda terdepan dalam proses verifikasi SPJ.
2	Yogahayu Kusumajati, S.E.	Petugas Bidang Usaha Mikro Kecil	9 Oktober 2025	Proses verifikasi melibatkan petugas urusan, ketua tim kerja untuk paraf, kepala bidang untuk tanda tangan persetujuan, verifikator keuangan, bendahara, hingga kepala dinas.
3	Agus Tejo Kumoro	Petugas Sekretariat	9 Oktober 2025	Pihak yang terlibat langsung dalam proses verifikasi adalah petugas verifikasi atau verifikator keuangan.
4	Ngesti Budi Purwanti, S.E.	Petugas Bidang Koperasi	14 Oktober 2025	Pihak yang terlibat yaitu petugas urusan, ketua tim kerja dan PPTK dalam pemberian paraf dan tanda tangan, dilanjutkan oleh verifikator, bendahara penerimaan, serta Pengguna Anggaran.
5	Siska Novi Anjarwati, A.Md.Ak.	Verifikator Keuangan	15 Oktober 2025	Pihak yang terlibat adalah langsung petugas urusan dan verifikator, tetapi secara keseluruhan proses juga melibatkan Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan Pengguna Anggaran (kepala dinas).
6	Agustin Budi Darwanti, S.E.	Petugas Bidang Industri	15 Oktober 2025	Proses verifikasi melibatkan verifikator keuangan dan bendahara.
7	Raden Rara Asri Widya Mulyaningrum, S. Sos., M.Sc.	Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	15 Oktober 2025	Pihak yang terlibat meliputi petugas urusan, verifikator, bendahara, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan Pengguna Anggaran.

Berdasarkan tabel 2. menunjukkan bahwa petugas urusan merupakan pihak awal yang berperan dalam proses verifikasi keuangan. Petugas urusan memiliki tanggung jawab dalam menyiapkan dan mengajukan dokumen keuangan, serta memastikan dokumen tersebut telah memperoleh paraf atau persetujuan dari atasan langsung, seperti ketua tim kerja, kepala subbagian, atau kepala bidang, serta tanda tangan PPTK. Tahapan ini berfungsi sebagai preventive control atas kebenaran, kelengkapan, dan legalitas dokumen sebelum memasuki tahap verifikasi formal di subbag keuangan.

Analisis Kesesuaian Pedoman dalam Proses Verifikasi Keuangan

Hasil wawancara pada tabel 3 dengan narasumber yang terdiri dari Bendahara Pengeluaran, Verifikator Keuangan, dan petugas urusan pada beberapa bidang di dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta, diperoleh informasi bahwa proses verifikasi keuangan dilaksanakan dengan berpedoman pada SOP yang telah ditetapkan. Seluruh narasumber secara konsisten menyatakan adanya SOP khusus verifikasi keuangan

dan SOP penatausahaan keuangan yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan administrasi serta verifikasi dokumen keuangan.

Tabel 3. Triangulasi Data tentang Pedoman dalam Proses Verifikasi Keuangan

Pertanyaan wawancara: Apakah terdapat pedoman atau Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus dalam proses verifikasi keuangan?				
No	Narasumber		Tanggal Wawancara	Hasil Wawancara
	Nama	Jabatan		
1	Yasicha Ella Ellysa, A.Md.Ak.	Bendahara Pengeluaran	9 Oktober 2025	Terdapat SOP khusus verifikasi keuangan dan SOP penatausahaan keuangan yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan verifikasi.
2	Yogahayu Kusumajati, S.E.	Petugas Urusan Bidang Usaha Mikro Kecil	9 Oktober 2025	Terdapat SOP yang menjadi patokan bagi petugas urusan dalam menyelesaikan administrasi keuangan.
3	Agus Tejo Kumoro	Petugas Urusan Sekretariat	9 Oktober 2025	Terdapat SOP khusus yang mengatur proses verifikasi keuangan.
4	Ngesti Budi Purwanti, S.E.	Petugas Urusan Bidang Koperasi	14 Oktober 2025	Ada.
5	Siska Novi Anjarwati, A.Md.Ak.	Verifikator Keuangan	15 Oktober 2025	Terdapat pedoman dan SOP verifikasi keuangan yang diperbarui secara berkala.
6	Agustin Budi Darwanti, S.E.	Petugas Urusan Bidang Industri	15 Oktober 2025	Ada.
7	Raden Rara Asri Widya Mulyaningrum, S. Sos., M.Sc.	Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	15 Oktober 2025	Ada.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilaksanakan penulis, tahapan dan alur verifikasi yang tertuang dalam dokumen SOP tersebut selaras dengan praktik verifikasi keuangan yang dijelaskan oleh para narasumber. Keselarasan ini menunjukkan adanya konsistensi antara pedoman tertulis dan implementasi prosedur verifikasi keuangan di lingkungan dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta

Analisis Mekanisme dalam proses Verifikasi Keuangan

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	0.535	1.377	–	0.388	0.699	–	–
	Kepuasan Kerja	0.311	0.113	0.286	2.760	0.007	0.322	3.107
	Produktivitas	0.282	0.120	0.268	2.348	0.021	0.265	3.769
	Kualitas Pelayanan	0.329	0.109	0.327	3.027	0.003	0.295	3.387

Berdasarkan tabel 4. Diketahui bahwa uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Kriteria bebas multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* harus lebih besar dari 0,10 dan/atau nilai VIF harus lebih kecil dari 10. Berdasarkan tabel *coefficients*, hasil uji menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen. Untuk variabel kepuasan kerja, nilai *Tolerance* adalah 0,322 dan nilai VIF adalah 3,107. Untuk variabel produktivitas, nilai *Tolerance* adalah 0,265 dan nilai VIF adalah 3,769. Terakhir, untuk variabel kualitas pelayanan, nilai *Tolerance* adalah 0,295 dan nilai VIF adalah 3,387. Karena semua nilai *Tolerance* berada di atas 0,10 dan semua nilai VIF berada di bawah 10, dapat disimpulkan bahwa variabel kepuasan kerja, produktivitas, dan kualitas pelayanan tidak memiliki korelasi yang tinggi satu sama lain, sehingga model regresi dinyatakan bebas dari masalah multikolinearitas.

Analisis Mekanisme dalam Proses Verifikasi Keuangan

Tabel 5. Triangulasi Data tentang Mekanisme dalam Proses Verifikasi Keuangan

Pertanyaan wawancara: Dalam praktiknya, apakah proses verifikasi dilakukan secara manual, digital, atau kombinasi keduanya?				
No	Narasumber		Tanggal Wawancara	Hasil Wawancara
	Nama	Jabatan		
1	Yasicha Ella Ellysa, A.Md.Ak.	Bendahara Pengeluaran	9 Oktober 2025	Verifikasi dilakukan secara manual, digital, dan kombinasi keduanya.
2	Yogahayu Kusumajati, S.E.	Petugas Urusan Bidang Usaha Mikro Kecil	9 Oktober 2025	Verifikasi dilakukan secara kombinasi, antara manual dan digital.
3	Agus Tejo Kumoro	Petugas Urusan Sekretariat	9 Oktober 2025	Verifikasi dilakukan secara manual dan digital.
4	Ngesti Budi Purwanti, S.E.	Petugas Urusan Bidang Koperasi	14 Oktober 2025	Verifikasi dilakukan secara manual.
5	Siska Novi Anjarwati, A.Md.Ak.	Verifikator Keuangan	15 Oktober 2025	Dilakukan secara kombinasi karena Verifikasi dilakukan secara manual, sedangkan pengembalian dokumen ke petugas urusan secara digital.
6	Agustin Budi Darwanti, S.E.	Petugas Urusan Bidang Industri	15 Oktober 2025	Dilakukan secara kombinasi.
7	Raden Rara Asri Widya Mulyaningrum, S. Sos., M.Sc.	Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	15 Oktober 2025	Verifikasi dilakukan secara kombinasi antara manual dan digital.

Berdasarkan hasil wawancara yang dirangkum pada tabel 5 diketahui bahwa mekanisme verifikasi keuangan di dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta dilaksanakan melalui pendekatan yang beragam, meliputi verifikasi secara manual, digital, serta kombinasi keduanya. Mayoritas narasumber menyatakan bahwa praktik verifikasi keuangan tidak dilakukan secara tunggal, melainkan mengombinasikan pemeriksaan dokumen fisik dengan pemanfaatan sarana digital sebagai pendukung proses administrasi.

Analisis Kendala dalam Proses Verifikasi Keuangan

Tabel 6. Triangulasi Data tentang Kendala dalam proses Verifikasi Keuangan

Pertanyaan wawancara: Apakah terdapat kendala dalam menerapkan regulasi atau SOP verifikasi di lapangan? Jika ada, apa saja kendalanya?				
No	Narasumber		Tanggal Wawancara	Hasil Wawancara
	Nama	Jabatan		
1	Yasicha Ella Ellysa, A.Md.Ak.	Bendahara Pengeluaran	9 Oktober 2025	Tidak terdapat kendala karena proses verifikasi sudah berjalan dengan baik dan sesuai SOP.
2	Yogahayu Kusumajati, S.E.	Petugas Urusan Bidang Usaha Mikro Kecil	9 Oktober 2025	Kendala berasal dari pihak ketiga yang sulit dihubungi saat diperlukan tanda tangan atau revisi dokumen sehingga memperlambat proses.
3	Agus Tejo Kumoro	Petugas Urusan Sekretariat	9 Oktober 2025	Kendala muncul ketika pimpinan OPD tidak berada di tempat sementara batas waktu penyelesaian dokumen sudah mendekati tenggat.
4	Ngesti Budi Purwanti, S.E.	Petugas Urusan Bidang Koperasi	14 Oktober 2025	Kendala terjadi saat Pengguna Anggaran tidak berada di tempat, yang menyebabkan keterlambatan proses pencairan.
5	Siska Novi Anjarwati, A.Md.Ak.	Verifikator Keuangan	15 Oktober 2025	Tidak terdapat kendala dalam penerapan SOP karena koordinasi antar pihak berjalan lancar dan kooperatif.
6	Agustin Budi Darwanti, S.E.	Petugas Urusan Bidang Industri	15 Oktober 2025	Belum ditemukan kendala.

Berdasarkan hasil wawancara yang dirangkum pada Tabel 6. dapat diketahui bahwa secara umum penerapan regulasi dan SOP verifikasi keuangan di dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta berjalan relatif lancar. Sebagian besar narasumber menyatakan bahwa tidak terdapat kendala signifikan dalam pelaksanaan verifikasi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa SOP verifikasi dan penatausahaan keuangan yang telah ditetapkan dapat dipahami dan dijalankan dengan baik oleh para pelaksana.

Analisis Peran Verifikasi dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran

Tabel 7. Triangulasi Data tentang Verifikasi dalam Pengelolaan Anggaran

Pertanyaan wawancara: Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana verifikasi keuangan berperan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran di dinas ini?				
No	Narasumber		Tanggal Wawancara	Hasil Wawancara
	Nama	Jabatan		
1	Yasicha Ella Ellysa, A.Md.Ak.	Bendahara Pengeluaran	9 Oktober 2025	Verifikasi berperan sangat penting dalam menjamin akuntabilitas melalui pemeriksaan kebenaran dokumen, kesesuaian anggaran, pajak, rekening penerima, DPA, standar harga, dan kelengkapan administrasi.
2	Yogahayu Kusumajati, S.E.	Petugas Urusan Bidang Usaha Mikro Kecil	9 Oktober 2025	Verifikasi berperan sebagai penyaring untuk meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan anggaran.
3	Agus Tejo Kumoro	Petugas Urusan Sekretariat	9 Oktober 2025	Verifikasi penting untuk memastikan kesesuaian nominal dan kepatuhan terhadap SOP.
4	Ngesti Budi Purwanti, S.E.	Petugas Urusan Bidang Koperasi	14 Oktober 2025	Verifikasi berperan signifikan karena proses pengeluaran keuangan bersifat ketat dan terkontrol.
5	Siska Novi Anjarwati, A.Md.Ak.	Verifikator Keuangan	15 Oktober 2025	Verifikasi berpengaruh terhadap percepatan realisasi anggaran sebab verifikasi yang lancar dapat mendukung optimalisasi penggunaan anggaran.
6	Agustin Budi Darwanti, S.E.	Petugas Urusan Bidang Industri	15 Oktober 2025	Verifikasi berperan dalam memastikan adanya pengendalian keuangan di dinas.
7	Raden Rara Asri Widya Mulyaningrum, S. Sos., M.Sc.	Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	15 Oktober 2025	Verifikasi keuangan berperan dalam mendeteksi kesalahan sejak awal, seperti kesalahan standar harga dan kode rekening, agar tidak menimbulkan kesulitan perbaikan di tahap akhir.

Berdasarkan hasil wawancara pada Tabel 7. dapat diketahui bahwa seluruh narasumber secara konsisten menilai verifikasi keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran di dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta. Verifikasi dipahami bukan sekadar sebagai proses administratif, melainkan sebagai mekanisme pengendalian yang memastikan setiap pengeluaran anggaran memiliki dasar yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengaruh Hasil Verifikasi terhadap Penyusunan Laporan Keuangan dan SPJ Kegiatan

Tabel 8. Triangulasi Data tentang Pengaruh Hasil Verifikasi

Pertanyaan wawancara: Apakah hasil verifikasi berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan dan SPJ kegiatan?				
No	Narasumber		Tanggal Wawancara	Hasil Wawancara
	Nama	Jabatan		
1	Yasicha Ella Ellysa, A.Md.Ak.	Bendahara Pengeluaran	9 Oktober 2025	Berpengaruh.
2	Yogahayu Kusumajati, S.E.	Petugas Urusan Bidang	9 Oktober 2025	Berpengaruh.

Pertanyaan wawancara: Apakah hasil verifikasi berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan dan SPJ kegiatan?

No	Narasumber		Tanggal Wawancara	Hasil Wawancara
	Nama	Jabatan		
3	Agus Tejo Kumoro	Usaha Mikro Kecil Petugas Urusan Sekretariat	9 Oktober 2025	Berpengaruh.
4	Ngesti Budi Purwanti, S.E.	Petugas Urusan Bidang Koperasi	14 Oktober 2025	Berpengaruh.
5	Siska Novi Anjarwati, A.Md.Ak.	Verifikator Keuangan	15 Oktober 2025	Berpengaruh.
6	Agustin Budi Darwanti, S.E.	Petugas Urusan Bidang Industri	15 Oktober 2025	Berpengaruh.
7	Raden Rara Asri Widya Mulyaningrum, S. Sos., M.Sc.	Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	15 Oktober 2025	Berpengaruh.

Berdasarkan hasil wawancara pada Tabel 8. sebagian besar narasumber menyatakan bahwa hasil verifikasi berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan dan SPJ kegiatan. Pernyataan tersebut disampaikan secara konsisten oleh petugas urusan, verifikator keuangan, serta kepala subbag keuangan, yang menunjukkan adanya pemahaman yang sama mengenai posisi strategis verifikasi dalam siklus penatausahaan keuangan.

Analisis Proses Tindak Lanjut atas Ketidaksesuaian Hasil Verifikasi Keuangan Tabel

Tabel 9. Triangulasi Data tentang proses Tindak Lanjut Hasil Verifikasi

Pertanyaan wawancara: Bagaimana proses tindak lanjut apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kesalahan dalam hasil verifikasi?

Narasumber		Tanggal Wawancara	Hasil Wawancara
Nama	Jabatan		
Yasicha Ella Ellysa, A.Md.Ak.	Bendahara Pengeluaran	9 Oktober 2025	Dokumen yang ditemukan kesalahan, kesalahan yang umumnya bersifat minor seperti salah hitung nominal atau ketidaksesuaian nomor rekening, dikembalikan dari PA/PPK ke verifikator, kemudian diteruskan ke petugas urusan untuk diperbaiki.
Yogahayu Kusumajati, S.E.	Petugas Urusan Bidang Usaha Mikro Kecil	9 Oktober 2025	Kesalahan segera diperbaiki oleh petugas urusan sesuai catatan dari verifikator dan dilengkapi kembali.
Agus Tejo Kumoro	Petugas Urusan Sekretariat	9 Oktober 2025	Dokumen yang tidak sesuai dikembalikan kepada pembuat SPJ untuk dilakukan perbaikan.
Ngesti Budi Purwanti, S.E.	Petugas Urusan Bidang Koperasi	14 Oktober 2025	Kesalahan yang ditemukan umumnya bersifat minor dan dapat langsung diperbaiki.
Siska Novi Anjarwati, A.Md.Ak.	Verifikator Keuangan	15 Oktober 2025	Verifikator menghubungi petugas urusan untuk menyampaikan kekurangan dokumen dan meminta perbaikan sebelum dokumen diproses ke tahap berikutnya.
Agustin Budi Darwanti, S.E.	Petugas Urusan Bidang Industri	15 Oktober 2025	Dokumen yang tidak sesuai dikembalikan untuk diperbaiki atau dibuat ulang.
Raden Rara Asri Widya Mulyaningrum, S. Sos., M.Sc.	Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	15 Oktober 2025	Dokumen SPJ yang tidak sesuai dikembalikan kepada petugas urusan, kemudian diajukan kembali untuk dilakukan verifikasi ulang.

Berdasarkan hasil wawancara pada Tabel 9 diketahui bahwa mekanisme tindak lanjut atas ketidaksesuaian hasil verifikasi keuangan di dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta dilaksanakan melalui prosedur pengembalian dokumen kepada

petugas urusan untuk dilakukan perbaikan. Pola ini muncul secara konsisten pada hampir seluruh jawaban narasumber, baik dari petugas urusan, verifikator keuangan, bendahara pengeluaran, maupun kepala subbag keuangan.

Upaya Peningkatan Efektivitas dan Akuntabilitas Verifikasi Keuangan

Tabel 10. Triangulasi Data tentang Upaya Peningkatan Efektivitas dan Akuntabilitas Verifikasi

Pertanyaan wawancara: Menurut Bapak/Ibu, apa langkah atau rekomendasi yang sebaiknya dilakukan agar verifikasi keuangan di dinas ini lebih efektif dan akuntabel?			
Narasumber		Tanggal	Hasil Wawancara
Nama	Jabatan	Wawancara	
Yasicha Ella Ellysa, A.Md.Ak.	Bendahara Pengeluaran	9 Oktober 2025	Peningkatan ketelitian dalam proses verifikasi serta adanya mekanisme verifikasi berlapis, khususnya untuk SPJ LS yang kembali diverifikasi oleh BPKAD.
Yogahayu Kusumajati, S.E.	Petugas Urusan Bidang Usaha Mikro Kecil	9 Oktober 2025	Penyederhanaan dan pemadatan alur verifikasi agar proses pencairan hingga transfer ke pihak ketiga dapat berlangsung lebih cepat.
Agus Tejo Kumoro	Petugas Urusan Sekretariat	9 Oktober 2025	Konsistensi dalam menjalankan SOP tanpa memotong jalur yang telah ditetapkan.
Ngesti Budi Purwanti, S.E.	Petugas Urusan Bidang Koperasi	14 Oktober 2025	Tidak memberikan rekomendasi karena proses verifikasi dinilai telah berjalan cepat.
Siska Novi Anjarwati, A.Md.Ak.	Verifikator Keuangan	15 Oktober 2025	Penguatan penerapan SOP, kelengkapan dokumen sejak awal, dan peningkatan ketelitian verifikator.
Agustin Budi Darwanti, S.E.	Petugas Urusan Bidang Industri	15 Oktober 2025	Tidak memberikan rekomendasi karena proses dinilai sudah berjalan dengan baik.
Raden Rara Asri Widya Mulyaningrum, S. Sos., M.Sc.	Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	15 Oktober 2025	Peningkatan kesiapan petugas urusan melalui asesmen mandiri dokumen SPJ sebelum diserahkan ke verifikator agar tidak terjadi keterlambatan dan koreksi berulang.

Berdasarkan hasil wawancara pada Tabel 10. diketahui bahwa sebagian besar narasumber menilai proses verifikasi keuangan di dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta telah berjalan dengan baik. Namun, beberapa narasumber tetap menyampaikan rekomendasi yang berfokus pada aspek ketelitian, efisiensi alur, serta penguatan penerapan SOP.

Pembahasan

Proses verifikasi keuangan merupakan tahapan krusial dalam penatausahaan keuangan daerah karena berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal sebelum pencairan anggaran dilakukan. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 menegaskan bahwa setiap pengeluaran daerah wajib didukung oleh dokumen yang lengkap, sah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, verifikasi keuangan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjamin akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Verifikasi keuangan mencerminkan penerapan prinsip pengendalian internal dan Teori *Stewardship*, yang memandang aparatur pemerintah sebagai pihak yang dipercaya (*steward*) untuk mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab demi kepentingan organisasi dan masyarakat. Dalam konteks ini, verifikasi dilaksanakan melalui mekanisme pemeriksaan berjenjang yang melibatkan beberapa pihak sesuai kewenangannya, sehingga tercipta fungsi pengawasan dan saling kontrol. Proses tersebut bertujuan memastikan bahwa setiap transaksi

keuangan telah selaras dengan tujuan kegiatan, perencanaan anggaran yang ditetapkan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum dicatat dan dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan. Dengan demikian, verifikasi berperan sebagai instrumen penting dalam menjaga integritas, akuntabilitas, dan keandalan informasi keuangan pemerintah daerah. Hasil wawancara pada Tabel 1. menunjukkan bahwa proses verifikasi keuangan di dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta dilaksanakan secara sistematis dan berlapis dengan melibatkan berbagai pihak sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya. Alur verifikasi dimulai dari pejabat pelaksana kegiatan teknis yang diwakili oleh petugas urusan, kemudian berlanjut ke unit keuangan, hingga memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran. Pola ini menunjukkan bahwa proses verifikasi telah selaras dengan struktur penatausahaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Tahap awal, petugas urusan memiliki peran sentral dalam menyusun dokumen keuangan berupa SPJ atau NPD beserta seluruh dokumen pendukung yang dipersyaratkan. Dokumen tersebut kemudian melalui proses pengesahan internal berupa paraf petugas urusan, paraf ketua tim kerja atau kepala subbagian, serta tanda tangan PPTK atau kepala bidang. Tahapan ini berfungsi sebagai bentuk pengendalian preventif (*preventive control*) untuk memastikan kebenaran, kelengkapan, dan legalitas dokumen sebelum memasuki tahap verifikasi formal di subbag keuangan. Setelah melalui pengesahan internal, dokumen SPJ diserahkan ke subbag keuangan untuk dilakukan verifikasi oleh verifikator keuangan. Berdasarkan keterangan Bendahara Pengeluaran dan Verifikator Keuangan, fokus verifikasi pada tahap ini adalah pemeriksaan kelengkapan administrasi, keabsahan bukti transaksi, serta kesesuaian dengan ketentuan anggaran dan regulasi yang berlaku. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sebelum diproses lebih lanjut.

Apabila dalam proses verifikasi ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian, dokumen SPJ akan dikembalikan kepada petugas urusan untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan catatan dari verifikator. Mekanisme pengembalian dan perbaikan dokumen ini menunjukkan adanya proses korektif yang terintegrasi dalam sistem verifikasi keuangan. Sebaliknya, apabila dokumen telah dinyatakan lengkap dan sesuai ketentuan, verifikator melanjutkan proses dengan pembuatan billing serta mengajukan dokumen untuk memperoleh pengesahan dari Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran.

Tahap akhir dari proses verifikasi ditandai dengan pencairan dana melalui sistem SIPD RI dan *Cash Management System* (CMS). Penggunaan sistem informasi keuangan tersebut menunjukkan adanya integrasi yang erat antara proses verifikasi dengan pemanfaatan sistem digital dalam pengelolaan keuangan. Integrasi ini memungkinkan setiap tahapan verifikasi terekam secara sistematis, sehingga meningkatkan transparansi, keterlacakan, dan ketertiban administrasi keuangan. Dengan dukungan sistem informasi, potensi kesalahan input, keterlambatan, maupun penyalahgunaan dapat diminimalkan. Dengan demikian, proses verifikasi tidak hanya berfokus pada memastikan keabsahan dan kelengkapan dokumen, tetapi juga berperan dalam menjamin ketepatan waktu, akurasi data, serta keamanan dalam proses pencairan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa proses verifikasi keuangan tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban perpajakan dan pengelolaan arsip keuangan. Setelah dokumen dinyatakan sesuai oleh verifikator, petugas urusan melaksanakan pembayaran pajak atas transaksi tunai sesuai ketentuan yang berlaku, menggandakan dokumen sebagai arsip fisik,

serta melakukan pemindaian bukti transaksi untuk arsip digital. Rangkaian tahapan ini menggambarkan bahwa verifikasi keuangan tidak hanya berfungsi sebagai tahapan pemeriksaan administratif, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian yang memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan dan mendukung tertib arsip. Dengan demikian, verifikasi keuangan berkontribusi langsung terhadap kelengkapan, keterlacakan, dan keandalan pertanggungjawaban keuangan, baik untuk kebutuhan internal maupun kepentingan pemeriksaan oleh pihak eksternal.

Kesamaan informasi yang disampaikan oleh petugas urusan, verifikator keuangan, bendahara pengeluaran, dan kepala subbag keuangan menunjukkan adanya konsistensi yang kuat antara praktik verifikasi di lapangan dengan struktur kewenangan serta alur penatausahaan keuangan yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pembagian peran dan tanggung jawab antar pelaksana telah berjalan sesuai ketentuan, sehingga meminimalkan potensi tumpang tindih kewenangan maupun kesalahan prosedural. Konsistensi tersebut juga menjadi indikator bahwa SOP Penatausahaan SPJ LS Barang dan Jasa serta SOP Penatausahaan SPJ GU tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi telah diinternalisasi dan diterapkan secara relatif seragam dalam pelaksanaan sehari-hari. Dengan penerapan SOP yang konsisten, proses verifikasi menjadi lebih terarah, terkontrol, dan mampu mendukung tertib administrasi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penerapan proses verifikasi keuangan yang berjenjang juga mencerminkan implementasi prinsip good governance, khususnya pada aspek akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan. Setiap tahapan verifikasi dirancang untuk memastikan bahwa seluruh penggunaan anggaran dapat ditelusuri secara jelas, dipertanggungjawabkan oleh pihak yang berwenang, serta dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Mekanisme ini memungkinkan adanya pengawasan berlapis yang dapat mendeteksi kesalahan maupun ketidaksesuaian sejak dini. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal yang berjalan secara konsisten dan efektif berperan penting dalam mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, serta mampu meminimalkan potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran publik (Dewata et al., 2021).

Berdasarkan proses verifikasi keuangan di dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta dapat dipahami sebagai mekanisme pengendalian internal yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dan strategis. Verifikasi tidak sekadar memastikan kelengkapan dokumen Surat Pertanggungjawaban Belanja, melainkan juga menilai kesesuaian antara realisasi belanja, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tujuan program dan kegiatan. Melalui proses ini, potensi kesalahan, penyimpangan, dan inefisiensi penggunaan anggaran dapat diminimalkan sejak dini. Selain itu, verifikasi berperan penting dalam menjamin kebenaran dan kepatuhan penggunaan anggaran, mendukung terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai proses verifikasi keuangan di dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa mekanisme verifikasi keuangan telah dilaksanakan secara sistematis dan berjenjang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proses verifikasi dimulai dari penyusunan SPJ oleh petugas urusan, dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh PPTK dan atasan terkait, kemudian diverifikasi oleh verifikator

keuangan, diketahui oleh bendahara dan PPK, serta disetujui oleh Pengguna Anggaran. Pelaksanaan verifikasi ini mencerminkan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), khususnya pada aspek kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi. Hal tersebut menunjukkan bahwa dinas telah berupaya menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah agar tetap akuntabel dan transparan. Proses verifikasi juga terbukti berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan dinas, karena setiap transaksi yang diverifikasi memastikan kesesuaian dengan DPA, standar harga, kode rekening, serta kewajiban perpajakan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada satu instansi dan periode waktu yang dimana hasilnya belum dapat digeneralisasi secara lengkap. Data juga bergantung pada dokumen dan wawancara internal. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala teknis, seperti keterlambatan penyerahan dokumen dan kurang optimalnya koordinasi antar pihak. Kendala tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal masih perlu ditingkatkan melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, verifikasi keuangan di dinas ini telah berjalan baik, namun tetap memerlukan penguatan agar mampu mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan beberapa OPD, menggunakan metode kuantitatif atau komparatif, serta mengkaji pemanfaatan sistem digital dalam proses verifikasi surat pertanggungjawaban belanja.

Acknowledgment

-

Daftar Pustaka

- Almausshofi, A., Novika, I., Nurmala, S. D., Aida, N., Hudani, M. M., & Nindien, Q. A. (2025). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2005-2024. *Journal Social Society*, 5(1), 272–282. <https://doi.org/10.54065/jss.5.1.2025.684>
- Astuti, H. P., Ilham, M., & Madjid, U. (2024). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di BPKAD Pemerintah Kota Tanjungpinang. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 10(1), 174-185. [https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10\(1\).17119](https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10(1).17119).
- Dewata, E., Jauhari, H., & El Auda, M. (2021). Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah: Sistem pengendalian intern pemerintah dan standar akuntansi pemerintahan daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 5(2), 101–114. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5747284>.
- Fitaloka, R. A. D., & Nawangsari, E. R. (2025). Akuntabilitas realisasi surat pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas di KPU Provinsi Jawa Timur. *J-Ceki : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 3710–3721. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i3.9323>.
- Malissa, R., Baharuddin, & Toding, A. (2025). Verifikasi dan persetujuan dana hibah: Upaya transparansi dan akuntabilitas di Sekretariat Daerah Papua Tengah. *Ecoholic: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(2), 301–307. <https://doi.org/10.1610/shkzcb96>.
- Mandasari, Y. E., Darajat, T. A., & Nurhasanah, N. (2024). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022. *Journal Of Economic, Business And Accounting*

- (Costing), 7(5). <https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.11237>.
- Mbipi, S. D., Assih, P., & Sumtaky, M. (2021). Pengelolaan keuangan daerah dan good governance terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah. *Afre (Accounting and Financial Review)*, 3(2), 152–158. <https://doi.org/10.26905/afr.v3i2.550>.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage
- Nugroho, R., Wahyono, C., Huraq, F., & Muhammad, A. S. (2023). Analisis pelaksanaan dan penatausahaan keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo: Perspektif governabilitas dan governmentalitas. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, 7(2), 122–133. <https://doi.org/10.47431/jirreg.v7i2.365>.
- Pangemanan, S. F. D. (2024). Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (JIAKu)*, 3(2), 168–179. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v3i2.6516>
- Peilouw, C. T., Oktavia, D. D., Wulandari, A. A., & Latuan, C. F. (2023). Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kupang). *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (Bijak)*, 5(1), 111–112. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v5i1.9641>.
- Ponto, E. S. A., Tinangon, J. J., & Afandi, D. (2024). Evaluasi pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Patokaan Kecamatan Talawaan. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 278–287. <https://doi.org/10.58784/rapi.184>
- Saputro, M. H., Baharuddin, & Toding, A. (2025). Peran dan tanggung jawab bendahara pengeluaran dalam pengelolaan keuangan daerah: Studi pada Sekretariat BPPKAD Provinsi Papua Tengah. *Ecoholic: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(2), 308–314. <https://doi.org/10.1610/c3273160>.
- Sari, T. K., Rocmawati, I., & Nugrahaningsih, N. (2026). Implementasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2023. *Journal Social Society*, 6(1), 506–518. <https://doi.org/10.54065/jss.6.1.2026.1011>
- Suciandini, G. A. M., & Yuniarta, G. A. (2025). Analisis penerapan sistem pengendalian internal dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan bebas korupsi: Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 16(02), 458–468. <https://doi.org/10.23887/jap.v16i02.100650>.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Syahban, W., Marzuki, S. N., & Buhasyim, M. A. (2025). Penerapan Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Loyalitas Anggota Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo. *Journal Social Society*, 5(1), 28–45. <https://doi.org/10.54065/jss.5.1.2025.625>
- Wahiruddin, M., Baharuddin, & Lambe, K. H. P. (2025). Transparansi pengelolaan keuangan melalui prosedur pencatatan di Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire. *Ecoholic: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(2), 245–250. <https://doi.org/10.1610/0nwmds64>.
- Warna, W., Hamzani, U., & Rusmita, S. (2024). Accountability and Transparency of Village Fund Budget Management. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 12(5), 1821–1830. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v12i5.2803>

- Widyastuti, E. S., Fachruddin, I., Abror, M., & Muzaqi, A. H. (2023). Implementasi pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 71–87. <https://doi.org/10.30996/jpap.v9i1.7891>.
- Wiguna, P. G. S., Suryawan, I. G. B., & Widiati, I. A. P. (2024). Mekanisme Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(2), 259-264. <https://doi.org/10.22225/jph.5.2.8091.259-264>